

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor kehutanan memegang peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hutan tidak cuma berfungsi sebagai sumber ekonomi, tapi juga punya peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, dan menopang kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan. Namun, tekanan terhadap hutan terus meningkat akibat eksplorasi berlebihan, perubahan fungsi lahan, serta kondisi kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah menghadirkan sistem pengelolaan hutan yang lebih melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks ini, Kelompok Tani Hutan (KTH) menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan secara kolaboratif. KTH merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk secara resmi untuk meningkatkan kapasitas petani hutan dalam mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, menambah penghasilan, serta memperkuat partisipasi mereka dalam program perhutanan sosial. Selain itu, KTH juga berperan memperluas akses masyarakat terhadap kawasan hutan yang legal dan berbagai fasilitas pendampingan dari pemerintah maupun lembaga swasta. Sebagai kelompok masyarakat yang fokus pada pengelolaan hutan berkelanjutan, KTH minimal beranggotakan 15 orang pelaku utama yang berdomisili di satu wilayah. Pembentukan KTH ini dimaksudkan untuk mendukung pembangunan kehutanan melalui partisipasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Permenhut No. P.57/2014 dan PermenLHK No. P.89/2018.

Proses pembentukan dan pengelolaan KTH tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah dasar hukum, administratif, serta aspek kelembagaan yang harus dipenuhi. Selain itu, partisipasi masyarakat, kepemimpinan lokal, kapasitas anggotanya, serta kerjasama dengan pihak terkait,

menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah KTH. Namun kenyataannya, masih banyak KTH mengalami kendala seperti lemahnya struktur organisasi, kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi kelompok, keterbatasan akses pasar, serta minimnya pengetahuan dalam mengelola usaha produktif berbasis hutan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kajian mengenai dasar-dasar dalam proses pembentukan dan pengelolaan KTH menjadi sangat penting. Pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pembentukan, struktur organisasi, regulasi terkait, serta strategi manajemen kelembagaan diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas fungsi KTH. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kelembagaan masyarakat sekitar hutan sebagai upaya mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam jangka panjang, kelompok tani diharapkan mampu menghadirkan inovasi baru agar petani ke depan semakin berkembang dalam budidaya maupun pemasaran hasil pertanian. Dengan begitu, keberlangsungan pertanian yang lebih modern dapat meningkatkan perekonomian petani. Namun kenyataannya, khususnya di Desa Kalirejo Kabupaten Kulonprogo, kinerja kelompok tani masih sangat lambat dan belum mampu memaksimalkan perannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani membutuhkan penyuluhan kehutanan.

Sebagai motivator, penyuluhan berperan mendorong petani dalam menjalankan usaha taninya. Penyuluhan juga memberikan pendampingan kepada petani dalam pengambilan keputusan penting, seperti penetapan harga jual, analisis untung rugi, serta negosiasi harga sarana produksi seperti pupuk. Selain itu, penyuluhan pertanian berperan membimbing masyarakat petani dalam upaya pengembangan kelompok tani agar lebih maju. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah organisasi bagi petani dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kelompok tani hutan perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal serta mengenali kekuatan dan kelemahan internal yang harus dibenahi (Herawati, 2017). Penilaian kinerja KTH dilakukan melalui serangkaian evaluasi

agar dapat mengembangkan organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait "Efektivitas Penyuluhan Kehutanan terhadap Kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Makmur Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan uraian latar belakang di atas terkait "Efektivitas Penyuluhan Kehutanan terhadap Kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Makmur Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo", rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana efektivitas kegiatan penyuluhan kehutanan terhadap kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Makmur di Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa saja bentuk kegiatan penyuluhan kehutanan yang dilaksanakan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Makmur di Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah terkait "Efektivitas Penyuluhan Kehutanan dalam Kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Makmur Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo" Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas kegiatan penyuluhan kehutanan terhadap kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Makmur di Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo.
2. Mendeskripsikan bentuk kegiatan penyuluhan kehutanan yang dilaksanakan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Makmur di Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terkait terkait “Efektivitas Penyuluhan Kehutanan dalam Kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Makmur Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo” memiliki manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penyuluhan kehutanan dalam Kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Makmur di Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo
2. Menjadi arahan bagi penyuluhan dalam Kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) Agro Makmur di Desa Kalirejo Kabupaten Kulon Progo